



Tata Kelola Perusahaan dan Keberlanjutan: Kinerja Triple Bottom Line

Eka Murtiasri¹, Prianka Ratri Nastiti², Moh. Haris³

¹ Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Semarang, Semarang, Indonesia

³ Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 10 Agustus 2023

Disetujui: 12 Agustus 2023

Dipublikasikan: 18 Agustus 2023

Keywords:

board of directors, governance mechanism, sustainability, triple bottom line performance

Abstract (Inggris)

The purpose of this study is to examine the effect of corporate governance on the performance of triple bottom line sustainability. Corporate governance is embodied in the number of Directors, the percentage of female Directors, expertise and frequency of meetings. The sustainability performance is proxied by the dimensions of sustainability: economic, environmental and social. The sample of this research are companies listed on the IDX 2020-2021 indexed LQ 45. Sampling was based on purposive random sampling which resulted in 52 data. Hypothesis testing was done by multivariate regression. Agency theory and Stakeholder theory are used as the theoretical basis for discussion. The test results that the greater the number of Directors has a negative effect on the economic, environmental and social performance. The large percentage of the number of female Directors has a positive effect on social performance, while the effect of the frequency of Directors' meetings has a positive effect on economic and environmental performance. The expertise of the Board of Directors has absolutely no effect on all dimensions of sustainability performance.

Abstrak (Bahasa Indonesia)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh tata kelola perusahaan terhadap kinerja keberlanjutan triple bottom line. Tata kelola perusahaan diprosikan dengan variabel jumlah Direksi, persentase Direksi perempuan, keahlian manajerial dan frekuensi rapat dewan. Sedangkan kinerja keberlanjutan diprosikan dengan tiga dimensi keberlanjutan: ekonomi, lingkungan dan sosial. Sampel penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2020-2021 terindeks LQ 45. Pengambilan sampel berdasarkan purposive random sampling yang menghasilkan 52 data. Pengujian hipotesis dilakukan dengan regresi multivariat. Hasil pengujian bahwa semakin besar jumlah Direksi berpengaruh negatif terhadap kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial. Besarnya persentase jumlah Direksi perempuan berpengaruh positif terhadap kinerja sosial, sedangkan frekuensi rapat Direksi berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi dan lingkungan. Keahlian Direksi sama sekali tidak berpengaruh terhadap semua dimensi kinerja keberlanjutan.

[✉]correspondence Address

Institutional address: Universitas PGRI Semarang

ISSN

2809-6282 (online)

PENDAHULUAN

Ditetapkannya Sustainability Development Goals (SDGs) 2015 - 2030 oleh PBB sebagai agenda global untuk pembangunan berkelanjutan, perhatian publik terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan telah menjadi tren yang berkembang dalam dua dekade terakhir. Deklarasi agenda pembangunan berkelanjutan merupakan momentum perubahan untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi bumi dan memastikan bahwa semua orang memiliki hak untuk memperoleh perdamaian dan kemakmuran. Pencapaian SDGs lingkungan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pelaku usaha dan pemangku kepentingan.

Penelitian kinerja keberlanjutan pada tiga dimensi, ekonomi, lingkungan dan sosial telah dilakukan dengan berbagai spesifikasi variabel dan kedalaman pengukuran. Walls et al (2012) menyatakan bahwa karakteristik perusahaan merupakan faktor yang mempengaruhi luasnya pengungkapan keberlanjutan. Lebih lanjut, Walls mengungkapkan bahwa perusahaan dengan jumlah Direksi yang lebih banyak dan keragaman gender berdampak pada kinerja lingkungan yang lebih tinggi. Peneliti lain Rodrigue dkk (2013) menghubungkan tata kelola perusahaan dengan pengungkapan lingkungan, sementara Mallin dkk (2013) menyatakan bahwa kinerja sosial sebagai pengungkapan tambahan.

Kualitas laporan keberlanjutan bergantung pada bagaimana informasi tanggung jawab sosial diungkapkan. Laporan keberlanjutan dapat diterbitkan sebagai bagian integral dari laporan tahunan, juga dapat berdiri sendiri (standalone). Man (2015) mendefinisikan tiga metode pengukuran kualitas *sustainability report* yang digunakan pada penelitian sebelumnya, yaitu area pengungkapan, indeks daerah pengungkapan, dan indeks keluasan dan kedalaman pengungkapan. Ada beberapa cara yang dilakukan untuk mengukur tingkat pengungkapan keberlanjutan, diantaranya mengacu pada jumlah kata (Deegan & Gordon, 1996), jumlah kalimat (Kait & van Staden, 2011), jumlah halaman (Patten, 1992), dan proporsi halaman (Haron et al., 2006). Metode ini hanya sesuai untuk mengukur kuantitas pengungkapan, tetapi tidak tepat untuk mengukur kualitas pengungkapan. Metode pengukuran ini juga tidak mampu menyampaikan informasi yang memadai untuk menghasilkan laporan yang berkualitas. Laporan yang panjang sangat mungkin mengandung informasi yang tidak relevan (Man, 2015b; Unerman, 2000; Chiu & Wang, 2015). Dalam berbagai penelitian, indeks pengungkapan digunakan untuk mengukur kuantitas laporan keberlanjutan, dengan cara membandingkan jumlah item yang dilaporkan dengan semua item yang seharusnya dilaporkan. Pengukuran indeks ini menggunakan skala nominal (Khan, 2018).

Berbagai literatur mengungkapkan teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976) dan teori pemangku kepentingan (Freeman, 1984) adalah dua perspektif teoretis yang menjelaskan hubungan antara tata kelola dan kinerja keberlanjutan. Teori keagenan menjelaskan hubungan yang saling bertentangan antara Direksi dan pemangku kepentingan dengan asumsi asimetri informasi, perilaku oportunistik agen, dan konflik kepentingan antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (Direktur).

Teori keagenan menyatakan bahwa tata kelola perusahaan yang efektif meningkatkan legitimasi perusahaan (Michelon & Parbonetti, 2012) dan kinerja keuangan (Jo & Harjoto, 2011). Teori keagenan menjelaskan peran manajemen dalam mengelola tujuan pemangku kepentingan. Ferchichi & Skanji (2017) menyatakan bahwa kinerja dewan yang efektif penting untuk mengekang oportunistik Direksi. Pendukung teori agensi lainnya seperti lenciu dkk (2012) dan Buniamin dkk (2011) percaya bahwa tata kelola yang efektif dapat mengurangi masalah keagenan.

Teori keagenan dan teori pemangku kepentingan saling melengkapi dengan keselarasan antara pemangku kepentingan, dan tujuan manajemen. Walls dkk (2012) berpendapat bahwa satu teori yang independen dari yang lain tidak dapat menjelaskan mengapa dan/atau bagaimana tujuan sosial menjadi bagian dari tujuan strategis perusahaan. Berdasarkan berbagai literatur, banyak peneliti menggunakan lebih dari satu teori untuk berhipotesis tentang hubungan antara dimensi tata kelola perusahaan dan CSR (Fodio dkk, 2012); Mallin dkk (2013); Amran dkk (2014); Sharif & Rasyid (2013); Arena dkk (2015); Post et al (2015).

a. Ukuran Kinerja Keberlanjutan

Beberapa penelitian telah menunjukkan hasil yang beragam mengenai hubungan antara ukuran dewan dan kinerja keberlanjutan. Berdasarkan perspektif teori Agency, board size yang besar menyebabkan kurang optimalnya pengawasan dalam tata kelola perusahaan. Dinamika tim dan pengambilan keputusan kolektif bersama dengan perspektif agensi mendukung ukuran dewan tata kelola yang lebih kecil (Amran et al., 2014). Prado-Lorenzo & Garcia-Sanchez (2010) berpendapat bahwa ukuran dewan yang besar merugikan efisiensi tata kelola.

Dei (2008) percaya bahwa ukuran dewan yang lebih kecil membuat komunikasi lebih efisien, yang menghasilkan peningkatan tanggung jawab dan komitmen. Di samping itu, Tamu (2009) menemukan bahwa dewan yang lebih kecil memiliki keahlian yang kurang terdiversifikasi daripada dewan yang lebih besar. Board yang lebih kecil memiliki beban kerja yang lebih tinggi untuk setiap anggota dewan, yang dapat mengurangi kemampuan untuk memantau dan mengontrol secara efektif. Arena dkk. (2015) mengungkapkan adanya hubungan positif antara ukuran dewan dan kelestarian lingkungan. Berdasarkan temuan tersebut, hipotesis yang dibangun adalah:

H1: Ukuran dewan berpengaruh negatif terhadap kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial.

b. Persentase Direktur Perempuan dan Kinerja Keberlanjutan

Komposisi Direksi ditafsirkan dalam keragaman antara komponen gender dan persentase Dewan. Kehadiran perempuan di dewan sebagai ukuran keragaman gender telah diasosiasikan secara positif dengan peningkatan orientasi terhadap daya tanggap sosial. Penafsiran ini terkait dengan perbedaan latar belakang yang berlaku (misalnya hukum, humaniora, pendidikan) yang mendorong perempuan lebih peka dalam hal memberi, berinisiatif, dan tertarik dalam kegiatan sosial. Perbedaan perilaku akibat ketidaksetaraan gender terjadi di lingkungan kerja (Galbreath, 2011). Orij (2010) menyatakan bahwa wanita lebih berorientasi sosial.

Keberadaan jumlah perempuan dengan karakteristik yang berbeda dengan laki-laki, memberikan keunikan tersendiri dan memberikan cara pandang, pengalaman, dan gaya

kerja yang berbeda (Giannarakis, 2014). Keberagaman gender di dewan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan karena terdapat lebih beragamnya perspektif dan pendekatan non-tradisional untuk memecahkan suatu masalah (Adams, 2015). Berdasarkan berbagai literatur tersebut, hipotesis berikut ini adalah: H2: Persentase direktur perempuan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial.

c. Rapat Dewan dan Kinerja Berkelanjutan

Rapat dewan sering digunakan sebagai proksi untuk menggambarkan tingkat aktivitas dan keseriusan dewan. Ada dua pendapat mengenai dampak prospektif dari aktivitas dewan terhadap kinerja keberlanjutan. Beberapa ahli memandang bahwa rapat Direksi lebih sering melambangkan ketidakefektifan, sehingga membatasi kinerjanya (Vafeas, 1999). Di samping itu, Lipton & Lorsch, (1992) berpendapat bahwa frekuensi pertemuan merepresentasikan efektivitas pengurus, sehingga fungsi pengawasan terhadap operasional perusahaan menjadi lebih baik dan mendorong perusahaan untuk meningkatkan transparansi.

Kajian Frias-Aceituno dkk. (2013) dan Prado-Lorenzo & Garcia-Sanchez (2010), melaporkan adanya hubungan negatif antara rapat dewan tahunan dan transparansi laporan. Kajian Giannarakis (2014) tidak menemukan hubungan antara jumlah rapat dewan dan kinerja keberlanjutan. Allegrini & Yunani (2013) meneliti hubungan yang baik antara jumlah rapat dewan dan transparansi organisasi. Adawi & Rwegasira (2011) dan Jizi et al. (2014) menghasilkan korelasi positif antara kegiatan dewan dan pengungkapan kinerja keberlanjutan. Adapun Ricart dkk. (2011) menyatakan bahwa semakin tinggi jumlah rapat dewan mewakili aktivitas dewan terkait dengan perencanaan strategis dan isu-isu keberlanjutan, sehingga rapat dewan berpengaruh positif terhadap kinerja keberlanjutan. Berdasarkan berbagai literatur tersebut, diusulkan hipotesis sebagai berikut:

H3: Frekuensi rapat Direksi berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial.

d. Keahlian Direksi dan Kinerja Keberlanjutan

Direksi dengan keahlian yang sesuai diharapkan mampu melaksanakan tugas pengawasan secara efektif sehingga dapat memberikan kontribusi pelaporan keuangan yang andal dan bernilai serta meningkatkan pengungkapan. Menurut teori agensi, jika dewan memiliki pengalaman yang luas, itu menjadi mekanisme yang efektif (Allini et al., 2016). Berdasarkan Fama & Jensen (1983), direksi yang memiliki keahlian dan pengetahuan seperti akuntansi, keuangan, teknologi informasi dan lain-lain akan mengurangi biaya keagenan dan masalah keagenan. Ketika Direksi memiliki kemampuan pengawasan, maka perilaku oportunistik manajemen akan berkurang. Apalagi direksi yang menduduki berbagai jabatan di luar perusahaan, merupakan sumber daya eksternal yang dapat membantu perusahaan dalam mengakses sumber daya eksternal dan asosiasi. (2020-2021 et al., 2017). Agrawal & Chadha (2005) meyakini bahwa direksi yang memiliki banyak pengalaman keuangan dan akuntansi memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menyusun laporan keberlanjutan sehingga dapat meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan.

Allini dkk. (2016) menunjukkan bahwa keragaman pendidikan direksi memiliki hubungan negatif dengan tingkat pengungkapan risiko. Berdasarkan teori keagenan, dan penelitian sebelumnya, pengetahuan dan keterampilan khususnya di bidang akuntansi dan keuangan dapat meningkatkan kualitas akurasi pengambilan keputusan, sehingga meningkatkan kualitas kinerja keberlanjutan. Berdasarkan berbagai temuan penelitian, diusulkan hipotesis berikut ini:

H5: Keahlian Direksi berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial.

Berdasarkan *research gap* dan *fenomena gap* muncul pertanyaan apakah terdapat pengaruh tata kelola perusahaan terhadap kinerja keberlanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ada. Studi ini akan menguji kembali pengaruh tata kelola terhadap kinerja keberlanjutan dengan memperluas indikator pengukuran. Kualitas laporan keberlanjutan tidak hanya didasarkan pada keluasan isi analisis tetapi juga kedalaman narasi, pencantuman nilai moneter dan grafik atau tabel yang menunjukkan aktivitas kinerja keberlanjutan.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan di Indonesia yang terdaftar dalam indeks LQ 45 tahun 2020 hingga 2021. Sampel penelitian meliputi 45 perusahaan berkinerja tinggi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (LQ Index 45). Teknik sampling purposive digunakan untuk mengumpulkan data.

a. Teknik pengukuran

Variabel dan metode pengukuran variabel penelitian, tercantum pada tabel 1

Tabel 1 Pengukuran Variabel

TIDAK	Akronim	Variabel	Pengukuran Variabel
1	EKUST	<i>Keberlanjutan ekonomi</i>	Indeks Keberlanjutan Ekonomi = item dimensi ekonomi yang dilaporkan/total item dimensi pelaporan ekonomi
2	ENVSUST	<i>Kelestarian Lingkungan</i>	Indeks Keberlanjutan Lingkungan = item dimensi lingkungan yang dilaporkan/total item dimensi pelaporan lingkungan
3	SOCSUST	<i>Keberlanjutan Sosial</i>	Indeks Keberlanjutan Sosial = item dimensi sosial yang dilaporkan/total item dimensi pelaporan sosial
4	BSIZE	<i>Ukuran papan</i>	Jumlah seluruh anggota Direksi
5	WOB	<i>Wanita di Dewan</i>	Proporsi Direksi perempuan
6	BMEET	<i>rapat dewan</i>	Jumlah rapat/pertemuan yang diselenggarakan Pengurus dalam 1 (satu) tahun
7	BEXP	<i>keahlian dewan</i>	Proporsi jumlah dewan dengan keahlian keuangan/Akuntansi dibandingkan dengan jumlah total dewan

TIDAK	Akronim	Variabel	Pengukuran Variabel
8	ROA	<i>Pengembalian Aset</i>	EBIT/Total Aset
9	KIJANG	<i>Pengembalian Ekuitas</i>	MAKAN/Ekuitas
10	UKURAN	<i>ukuran perusahaan</i>	Total aset yang dimiliki
11	SGROW	<i>Pertumbuhan</i>	Pertumbuhan 1 tahun - pertumbuhan 0/tahun 0
12	INRD	<i>Investasi Pengembangan Riset</i>	Biaya Penelitian/total biaya
13	KAPTEN	<i>Padat Modal</i>	Perbandingan total utang versus total aset

Sumber: data penelitian, 2022

Dalam pengukuran kualitas pengungkapan keberlanjutan dilakukan dengan memodifikasi pengukuran yang dilakukan oleh Habek & Wolniak, (2016), dengan menggunakan indeks pengungkapan dengan skala 0 sampai dengan 3. Skor 0 digunakan untuk perusahaan yang tidak mengungkapkan item yang bersangkutan; 1 bagi perusahaan yang mengungkapkan hal tersebut tetapi hanya secara naratif; sedangkan 2 adalah untuk perusahaan yang mengungkapkan item yang secara non-moneter; dan skor 3 digunakan untuk perusahaan yang melakukan pengungkapan moneter. Penilaian tersebut sesuai dengan metode penelitian (Michelon & Parbonetti, 2012).

Pada persamaan di atas, nilai indeks pengungkapan setiap dimensi bergantung pada sejumlah item tertentu yang dituangkan dalam pedoman. Terdapat 91 indikator pengungkapan keberlanjutan, indikator ekonomi meliputi 9 item, lingkungan 34 item, dan sosial 48 item. Untuk mengukur kinerja dimensi keberlanjutan digunakan bobot rata-rata dari seluruh item yang dilaporkan. Ukuran ini memperluas ukuran yang biasa digunakan dalam penelitian sebelumnya (Plumlee et al., 2015). Johnson & Green (2014) menerapkan langkah-langkah serupa untuk kinerja tanggung jawab sosial perusahaan.

b. Model Empiris dan Teknik Estimasi

Pengujian hubungan mekanisme tata kelola dengan kinerja keberlanjutan menggunakan data perusahaan berindeks LQ 45 dalam rentang waktu 2020 dan 2021. Model regresi digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Dalam pengujian hipotesis, dirumuskan dalam persamaan berikut:

$$ECSUST, ENVSUST, ENVSUST = \alpha + \beta BSIZE + \beta WOB + \beta BMEET + \beta EXT + \beta ROA + \beta ROE + \beta SGROW + \beta INTRD + \beta CAPINT + \varepsilon$$

HASIL DAN DISKUSI

Uji Normalitas dan Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan pengujian kualitas data dan uji asumsi klasik. Berdasarkan hasil pengujian normalitas data diperoleh hasil semua data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal (seluruh nilai probabilitas variabel independen lebih besar dari taraf signifikan 0,05).

Berdasarkan uji asumsi klasik tidak terjadi multikolinearitas (nilai VIF kurang dari 10 dan atau nilai tolerance lebih dari 0,01), tidak ada heteroskedastisitas (semua nilai probabilitas variabel independen lebih besar dari 0,05), dan tidak ada autokorelasi (semua nilai probabilitas variabel independen lebih besar dari 0,05). tidak ditemukan masalah dalam uji asumsi klasik, maka dimungkinkan untuk menguji hipotesis. Hasil pengujian hipotesis disajikan pada tabel 3.

Tabel 1 Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Masalah	T	Hasil
H1a:	0,0002	2.383270	Diterima
H1b:	0,0219	4.077641	Diterima
H1c:	0,0130	2.596327	Diterima
H2a:	0,8295	0,181610	Ditolak
H2b:	0,8568	0,216664	Ditolak
H2c:	0,0360	2.168710	Diterima
H3a:	0,0097	2.825915	Diterima
H3b:	0,0073	2.711767	Diterima
H3c:	0,2908	1.070281	Ditolak
H4a:	0,0851	1.239476	Ditolak
H4b:	0,2222	1.764608	Ditolak
H4c:	0,6020	0,525613	Ditolak

Sumber: Data Riset Olahan, 2022

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa ukuran dewan berpengaruh negatif terhadap kinerja keberlanjutan, baik kinerja keberlanjutan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Secara umum dinyatakan bahwa semakin besar ukuran dewan, semakin kurang efektif pemantauan, kontrol, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dihasilkannya. Berdasarkan perspektif Agency theory, ukuran dewan yang besar menyebabkan kurang optimalnya pengawasan dalam tata kelola perusahaan.

Kehadiran perempuan di dewan hanya berpengaruh positif terhadap kinerja keberlanjutan sosial, namun tidak berpengaruh terhadap kinerja keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Penelitian ini mendukung teori pemangku kepentingan yang menyatakan bahwa perempuan lebih berorientasi sosial daripada laki-laki. Direksi perempuan berbeda dalam gaya kepemimpinan dan lebih cenderung mendukung kelompok masyarakat dan proyek tanggung jawab sosial. Namun, hasil penelitian ini

tidak sejalan dengan temuan bahwa keragaman komposisi dewan mengarah pada pengambilan keputusan perusahaan dan kinerja ekonomi yang lebih baik karena gaya kerja perempuan memberikan perspektif pengalaman dan gaya kerja yang berbeda.

Jumlah rapat dewan sebagai tanda keseriusan dewan, dan menghipotesiskan hubungan positif antara frekuensi rapat dewan dan kinerja keberlanjutan. Hasil kajian menyatakan bahwa semakin banyak rapat yang dilakukan, semakin meningkatkan kinerja keberlanjutan ekonomi dan lingkungan, namun tidak mempengaruhi kinerja sosial. Allegrini & Yunani (2013) dan Ricart dkk. (2011) menemukan hubungan positif antara jumlah rapat dewan dengan transparansi organisasi, perencanaan strategis dan pengungkapan kinerja keberlanjutan.

Keahlian dewan tidak mempengaruhi kinerja keberlanjutan ekonomi, lingkungan dan sosial. Hasil ini tidak sesuai dengan temuan berdasarkan teori keagenan, dan temuan empiris sebelumnya. Pengetahuan dan keterampilan khususnya di bidang akuntansi dan keuangan dapat meningkatkan kualitas ketepatan pengambilan keputusan Direksi sehingga meningkatkan kualitas pengungkapan keberlanjutan. Pengalaman yang membentuk memiliki peran yang lebih baik dalam mengungkapkan kinerja keberlanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, disimpulkan bahwa dari keempat variabel yang diteliti, ukuran dewan memiliki pengaruh paling signifikan terhadap kinerja keberlanjutan. Jumlah Direksi mempengaruhi ketiga dimensi kinerja keberlanjutan, artinya Direksi akan efektif dalam jumlah tertentu tergantung besar kecilnya operasi perusahaan, namun jika jumlah Direksi terlalu banyak maka akan terjadi inefisiensi, sehingga menurunkan kinerja keberlanjutan perusahaan. Sebaliknya, kinerja keberlanjutan sama sekali tidak dipengaruhi oleh keahlian dewan. Alasan logis dari temuan tersebut adalah bahwa pendidikan bukanlah satu-satunya faktor yang dapat menjadikan Direksi kompeten dalam mengambil keputusan. Membutuhkan pengalaman dan keterampilan dalam mengelola dan bernegosiasi dalam pengambilan keputusan. Persentase jumlah Direksi perempuan hanya berpengaruh positif terhadap kinerja keberlanjutan sosial, tetapi tidak berpengaruh terhadap kinerja keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Alasan yang melatarbelakangi hasil ini sangat logis karena sifat perempuan yang lebih mudah tersentuh saat menghadapi masalah sosial serta karena etika komunikasi yang lebih baik.

Semakin banyak rapat yang dilakukan dewan dapat meningkatkan kinerja ekonomi dan kelestarian lingkungan, namun tidak mempengaruhi kinerja sosial. Frekuensi pertemuan merepresentasikan efektivitas dewan, sehingga fungsi pengawasan terhadap

operasional perusahaan menjadi lebih baik dan memotivasi perusahaan untuk meningkatkan transparansi. Jika hasil kajian ini dilihat dari perspektif kinerja keberlanjutan, dapat dinyatakan bahwa kinerja ekonomi dipengaruhi oleh jumlah Direksi dan frekuensi rapat yang diselenggarakan dewan. Kinerja sosial dipengaruhi oleh jumlah Direksi dan persentase jumlah Direksi perempuan. Sedangkan kinerja lingkungan dipengaruhi oleh jumlah Direksi dan jumlah rapat yang diselenggarakan dewan.

SARAN

Kajian ini berimplikasi pada pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan terkait peraturan tentang praktik dan pengukuran pengelolaan lingkungan dan sosial.

Ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, pertama, data hanya mencakup dua tahun pengamatan. Hasil penelitian akan lebih meyakinkan jika pengamatan dilakukan minimal selama 3 tahun dan bersifat longitudinal. Kedua, sampel perusahaan hanya mencakup jumlah terbatas, perusahaan yang terindeks LQ 45. Jika data mencakup semua perusahaan dengan kinerja baik dan buruk, maka hasil yang diperoleh akan lebih mewakili kondisi yang sebenarnya. Ketiga, penelitian ini akan lebih baik jika dilakukan pada wilayah yang jangkauannya lebih luas, seperti antar negara, sehingga hasilnya dapat menunjukkan perbedaan antar negara dan lebih dapat digeneralisasikan. Akhirnya, penilaian dari pihak independen merupakan faktor yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kualitas pelaporan keberlanjutan sehingga memasukkan pendapat pihak independen sebagai faktor pengukuran kualitas perlu diperhatikan. Semua keterbatasan ini dapat dijadwalkan untuk penelitian masa depan.

REFERENSI

Adawi, M., & Rwegasira, K. (2011). Corporate boards and voluntary implementation of best disclosure practices in emerging markets: Evidence from the UAE listed companies in the Middle East. *International Journal of Disclosure and Governance*, 8(3), 272–293. <https://doi.org/10.1057/jdg.20111.5>

Agrawal, A., & Chadha, S. (2005). The University of Chicago The Booth School of Business of the University of Chicago Governance And Accounting Scandals *. *Journal of Law and Economics*, 48(2), 371–406.

Agyei-Mensah, BK (2018). Impact of corporate governance attributes and financial reporting lag on corporate financial performance. *African Journal of Economic and Management Studies*, 9(3), 349–366. <https://doi.org/10.1108/AJEMS-08-2017-0205>

Allegrini, M., & Greco, G. (2013). Corporate boards, audit committees and voluntary disclosure: Evidence from Italian Listed Companies. *Journal of Management and Governance*, 17(1), 187–216. <https://doi.org/10.1007/s10997-011-9168-3>

Allini, A., Manes Rossi, F., & Hussainey, K. (2016). The board's role in risk disclosure: an exploratory study of Italian listed state-owned enterprises. *Public Money and Management*, 36(2), 113–120. <https://doi.org/10.1080/09540962.2016.1118935>

Amran, A., Lee, SP, & Devi, SS (2014). The influence of governance structure and strategic corporate social responsibility toward sustainability reporting quality. *Business Strategy and the Environment*, 23(4), 217–235. <https://doi.org/10.1002/bse.1767>

Arenas, C., Bozzolan, S., & Michelon, G. (2015). Environmental Reporting: Transparency to Stakeholders or Stakeholder Manipulation? An Analysis of Disclosure Tone and the Role of the Board of Directors. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 22(6), 346–361. <https://doi.org/10.1002/csr.1350>

Buniamin, S., Alrazi, B., Johari, NH, & Abd Rahman, NR (2011). Corporate governance practices and environmental reporting of companies in Malaysia: Finding possibilities of double thumbs up. *Journal of Management*, 32, 55–71. <https://doi.org/10.17576/pengurusan-2011-32-06>

Chiu, TK, & Wang, YH (2015). Determinants of Social Disclosure Quality in Taiwan: An Application of Stakeholder Theory. *Journal of Business Ethics*, 129(2), 379–398. <https://doi.org/10.1007/s10551-014-2160-5>

Fama, EF, & Jensen, MC (1983). Corporations and Private Property: A Conference Sponsored by the Hoover Institution. *Journal of Law and Economics*, 26 No. 2(2), 301–325. <http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3728530.pdf>

Ferchichi, J., & Skanji, M. (2017). Audit Committee and Board Effectiveness against Voluntary Disclosure in the Pre and Post Enactment of the Tunisian Central Bank Circular n ° 2011-06 of Good Governance Practices. *International Research Journal of Finance and Economics*, 1(159), 1–19. <http://www.internationalresearchjournaloffinanceandeconomics.com>

Giannarakis, G. (2014). Corporate governance and financial characteristic effects on the extent of corporate social responsibility disclosure. *Social Responsibility Journal*, 10(4), 569–590. <https://doi.org/10.1108/SRJ-02-2013-0008>

Jensen, MC, & Meckling, WH (1979). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure *Journal of Financial Economics*, 3(4), 163–231.

Jizi, MI, Salama, A., Dixon, R., & Stratling, R. (2014). Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Disclosure: Evidence from the US Banking Sector. *Journal of Business Ethics*, 125(4), 601–615. <https://doi.org/10.1007/s10551-013-1929-2>

Jo, H., & Harjoto, MA (2011). Corporate Governance and Firm Value: The Impact of Corporate Social Responsibility. *Journal of Business Ethics*, 103(3), 351–383. <https://doi.org/10.1007/s10551-011-0869-y>

Kakanda, MM, Salim, B., & Chandren, S. a/p. (2017). Corporate Governance, Risk Management Disclosure, and Firm Performance: A Theoretical and Empirical Review Perspective. *Asian Economic and Financial Review*, 7(9), 836–845. <https://doi.org/10.18488/journal.aefr.2017.79.836,845>

Laksmana, I. (2008). Corporate Board Governance And Voluntary Disclosure Of Executive Compensation Practices P . O. Box 5190 U . S. A. November.

Mallin, C., Michelon, G., & Raggi, D. (2013). Monitoring Intensity and Stakeholders' Orientation: How Does Governance Affect Social and Environmental Disclosure? *Journal of Business Ethics*, 114(1), 29–43. <https://doi.org/10.1007/s10551-012-1324-4>

Man, CK (2015a). International Perspectives: The impact of Corporate Sustainability Disclosure Decision, Disclosure Quality, Disclosure Quantity, Disclosure Index on Financial Analyst Following, Forecast Accuracy and Forecast Dispersion: Evidence from Financial Times Glob. 1.4.2.

Man, CK (2015b). Phd Thesis: International Perspective: The Impact of Corporate Social Responsibility Reports on Analysts' Coverage and Forecast Properties: Evidence from Ft Global 500. SSRN Electronic Journal, January 2015. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2583165>

Michelon, G., & Parbonetti, A. (2012). The effect of corporate governance on sustainability disclosure. *Journal of Management and Governance*, 16(3), 477–509. <https://doi.org/10.1007/s10997-010-9160-3>

Orij, R. (2010). Corporate social disclosures in the context of national cultures and stakeholder theory. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 7(23), 868–889.

Plumlee, M., Brown, D., Hayes, RM, & Marshall, RS (2015). Voluntary environmental disclosure quality and firm value: Further evidence. *Journal of Accounting and Public Policy*, 34(4), 336–361. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2015.04.004>

Post, C., Rahman, N., & McQuillen, C. (2015). From Board Composition to Corporate Environmental Performance Through Sustainability-Themed Alliances. *Journal of Business Ethics*, 130(2), 423–435. <https://doi.org/10.1007/s10551-014-2231-7>

Prado-Lorenzo, JM, & Garcia-Sanchez, IM (2010). The Role of the Board of Directors in Disseminating Relevant Information on Greenhouse Gases. *Journal of Business Ethics*, 97(3), 391–424. <https://doi.org/10.1007/s10551-010-0515-0>

<https://doi.org/10.1002/jctb.619>

Ricart, JE, Rodríguez, MA, & Sánchez, P. (2011). Sustainability in the Boardroom: An Empirical Examination of Dow Jones Sustainability World Index Leaders. *SSRN Electronic Journal*, 3(577). <https://doi.org/10.2139/ssrn.672202>

Rodrigue, M., Magnan, M., & Cho, CH (2013). Is Environmental Governance Substantive or Symbolic? An Empirical Investigation. *Journal of Business Ethics*, 114(1), 107–129. <https://doi.org/10.1007/s10551-012-1331-5>

Sharif, M., & Rashid, K. (2013). Corporate governance and corporate social responsibility (CSR) reporting: *an empirical evidence from commercial banks (CB) of Pakistan*. <https://doi.org/10.1007/s11135-013-9903-8>

Visser, W., & Elkington, J. (2013). Cannibals with Forks. *The Top 50 Sustainability Books*, April, 108–112. https://doi.org/10.9774/gleaf.978-1-907643-44-6_24